



**RILIS KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
TERKAIT EVALUASI PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 DAN PERSIAPAN
SERTA KESIAPAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024 - 2025
KE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TANGGAL 22 – 24 AGUSTUS 2024**

Komisi II DPR RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 22 Agustus 2024 dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terkait evaluasi pemilu serentak tahun 2024 dan persiapan serta kesiapan pilkada serentak tahun 2024. Kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI dipimpin oleh Drs. H. Guspari Gaus, M.Si Ketua Tim/Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN. Kunjungan kerja spesifik hari ini diikuti juga oleh beberapa Anggota Komisi II DPR RI dari berbagai fraksi, dan didampingi pula oleh pejabat dari kementerian/lembaga yang menjadi mitra Komisi II DPR RI, yakni dari KPU RI.

Komisi II DPR RI berharap penyelenggaraan pilkada serentak pada 27 November 2024 dapat berjalan lancar, tertib, dan aman tanpa ada gesekan ataupun konflik. Pilkada tahun ini merupakan hal yang luar biasa karena pertama kali pilkada diselenggarakan serentak sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Komisi II DPR RI ingin memastikan tahapan-tahapan pilkada berjalan dengan baik dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh penyelenggara pilkada. Beberapa hal yang menjadi perhatian Komisi II DPR RI antara lain: Ketersediaan anggaran melalui Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD), upaya meningkatkan partisipasi pemilih, kondisi kesehatan panitia adhoc agar tidak ada yang sakit ataupun meninggal, jumlah daftar pemilih yang dinamis serta fleksibilitas dalam melaksanakan aturan, sosialisasi penyelenggaraan pilkada serentak, dan netralitas ASN.

Dalam sambutannya Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemilu serentak pada 14 Februari 2024 yang lalu berjalan harmonis dan kondusif. Partisipasi pemilih pada pemilu serentak 2024 di Provinsi

Kalimantan Timur mencapai 79%. Jaringan Forkopimda juga telah membangun koordinasi yang sangat baik dalam mempersiapkan penyelenggaraan pilkada serentak 2024 agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. NPHD sudah ditandatangani dan diberikan ke 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga telah mengalokasikan anggaran untuk jaminan sosial ketenagakerjaan bagi penyelenggara pilkada.

Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan bahwa koordinasi dengan berbagai stakeholder dalam mempersiapkan penyelenggaraan pilkada serentak berjalan dengan sangat baik antara lain 1) kemudahan dalam mendapatkan anggaran NPHD dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2) Kerjasama yang baik dengan Polda Kalimantan Timur dalam proses pendataan dan sosialisasi kepada para pekerja di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hanya sekitar 600 orang yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam pilkada serentak yang akan datang. Selain itu, terdapat 3 pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat yang tersebar di 3 daerah yaitu Kota Samarinda, Kota Bontang, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Menghadapi tahapan pendaftaran pasangan calon, KPU Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan verifikasi ijazah.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan bahwa dalam tahapan pencalonan perseorangan selalu terjadi persoalan terkait adanya keberatan penduduk terhadap penggunaan identitas penduduk yang dipakai untuk memenuhi persyaratan pasangan calon perseorangan tanpa izin. Namun keberatan masyarakat yang dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur seringkali tidak dapat ditindaklanjuti karena dokumen tersebut terdapat dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Dalam melakukan pengawasan akses yang diberikan KPU Provinsi Kalimantan Timur pada Silon sangat minim sehingga sulit untuk menyandingkan data yang terdapat dalam Silon dengan fakta yang terjadi. Selain itu, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan peningkatan pengawasan partisipasi pada pemilih pemula di 203 sekolah dan 33 perguruan tinggi se- Provinsi Kalimantan Timur (*non budgeting*). Dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024, Provinsi Kalimantan Timur termasuk dalam kategori rawan tinggi peringkat ke-5 dengan nilai 77.04%. Oleh karena itu, dilakukan pengawasan untuk mencegah potensi pelanggaran melalui sistem integrasi data, membuka saluran siaga pilkada 2024 melalui WhatsApp (WA) agar masyarakat dengan mudah memberikan informasi terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, gerakan mengawasi, serta lomba menulis dan video untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Selanjutnya Deputi Bidang Teknis KPU RI menyatakan bahwa sebanyak 545 daerah telah siap menyelenggarakan pilkada serentak 2024. Pada hari ini, KPU RI telah menetapkan hasil pemilu 2024 setelah adanya putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) jilid 2 Mahkamah Konstitusi. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional pada Pemilu 2024. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.60/PUU-XXII/2024 dan putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024, KPU RI akan mengikuti putusan MK terkait perubahan norma dalam UU pilkada yaitu norma ambang batas pencalonan kepala daerah dan norma syarat batas usia calon kepala daerah. Peraturan KPU akan disesuaikan dengan putusan MK tersebut.

Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Forkopimda, KPU dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur atas kesiapannya dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2024. Beberapa catatan yang disampaikan anggota Komisi II DPR RI pada kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kalimantan Timur yang telah menyediakan anggaran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi penyelenggara pilkada guna memberikan perlindungan atas risiko saat menjalankan tugas.
2. Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih, Komisi II DPR RI mendorong Pemerintah Kalimantan Timur bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan berbagai upaya sosialisasi agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya pada pilkada serentak 2024.
3. Terhadap IKP dengan kerawanan tinggi di Provinsi Kalimantan Timur, Komisi II DPR RI mendorong KPU dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian dan Forkopimda untuk mengantisipasi potensi kerawanan pada setiap tahapan seperti pencalonan, kampanye, penghitungan, hingga penetapan.
4. Komisi II DPR RI meminta KPU Provinsi Kalimantan Timur meningkatkan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terkait kemudahan akses data pada Silon sesuai dengan aturan yang berlaku agar proses penanganan pelanggaran dapat berjalan lancar.
5. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.60/PUU-XXII/2024 dan putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024, Komisi II DPR RI meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menaati aturan yang berlaku sebagaimana

putusan MK serta menyesuaikan perubahan norma dalam peraturan pelaksanaan pilkada serentak 2024.

Kota Balikpapan, 22 Agustus 2024,

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur.